

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Andini Maharani Puri Elok, 2016, *Hukum Partai Politik dan Sistem Pemilu*, (Jakarta Barat: Halaman Moeka Publishing).

Bintan R. Saragih, 2014, *Hukum Pemilu sebagai Praktik Ketatanegaraan*, (Bekasi : Gramata).

Fajlurrahman Jurdi, 2018, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

Isharyanto, 2017, *Partai Politik Ideologi dan Kekuasaan*, (Yogyakarta: CV Absolute Media).

Denny Indrayana, 2019, *Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kompas).

Junaidi Veri, 2013, *Politik Hukum Sistem Pemilu*, (Jakarta Selatan: Yayasan Perludem).

Lilik Mulyadi, 2009, *Pergeseran Perspektif dan Praktek Dari Mahkamah Agung mengenai Putusan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti).

Mahfud Md, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

Mahyudin, 2021, *Sengketa Proses Pemilu*, (Bantul Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group).

Muhadam Labolo, 2017, *Partai Politik dan Sistem pemilihan Umum di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada).

Muhaimin, 2020, *Mekanisme Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram

University Press).

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram-NTB: Mataram University Press).

Yuliano Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Rahmat Bagja, 2019, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, (Depok: Raja Wali Pers).

Rosidin Utang, 2021, *Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu*, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung).

Syamsuddin Haris, 2005, *Pemilu langsung di Tengah Oligarki Partai*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama).

Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar: Pustaka Ramadhan).

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).

JURNAL

A Prasetyo Wibowo, 2022, *Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Kewarganegaraan, Volume 6, Nomor 2.

Adrianus Bawamenewi, 2019, *Implementasi Hak Politik Warga Negara*, Jurnal Warta Edisi: 61, Volume 2 Nomor 1.

C.Deegan, and B. Gordon, *A Student of the Environmental Disclosure Practices of Australian Corporations*, Accounting and Business Research, Vol.26, No. 3.

Ellya Rosana, 2012, *Partai Politik dan Pembangunan Politik*, Jurnal Teropong Aspirasi Politik, Volume 8, Nomor 1.

Erick B, 2022, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Indonesia*,
Jurnal Analisis Hukum, Volume 5, Nomor 2.

Jurnal Konstitusi, 2013, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan
Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, Volume 10, Nomor 1.

Jurnal Equilibrium, 2021, *Ajudikasi Dalam Perspektif Teori*, Volume 2, Nomor 1.

Jurnal Kenegaraan, 2023, *Analisis Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum Terhadap Mantan Narapidana Korupsi Pada
Pencalonan Pemilu 2024*, Volume 1 Nomor 1.

Jurnal Konstitusi, 2013, *Peran Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan
Hak Asasi Manusia terkait Penyelenggaraan Pemilu*, Volume 10, Nomor 1.

Jurnal Madani Hukum, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari
Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota
Legislatif Mantan Narapidana* (Volume 1 Nomor 2 Agustus 2023).

Jurnal Yusitia, 2019, *Kedudukan Mantan narapidana Dalam Mengikuti pilkada
Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu/Xvii/2019*, Volume 20, No
2.

Kharul Fahmi, 2010, *Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan
Umum Anggota Legislatif*, Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3.

La Sensus, 2022, *Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian
Sengketa Proses Pemilu*, Halu Oleo Legal Research, Volume 4, Nomor 2.

Muhammad Ichsan Kabulla, 2020, *Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu*, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor

1.

Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004).

Pengawasan Pemilu, *Konstitusionalitas Calon Legislatif Mantan Narapidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Volume 8, Nomor 1.

Romli Lili, 2011, *Rerformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, Volume 2, Nomor 2.

Sanusi, 2021, *Penyelesaian Sengketa Oleh Bawaslu Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Kasus Penetapan Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD di Kota Cirebon)*, Jurnal Hermeneneutika, Volume 5, Nomor 1.

Sukawati Lanang, 2019, *Penegakan Hukum Dalam Pemilihan Umum*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 3, Nomor 1.

Suyud Margono, *ADR & Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum)*.

Syariaty, 2020, *Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai alon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Volume 6, Nomor 2.

Madani, 2018, *Hak Politik Mantan Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Putus~ Mahkamah Agung Nomor 46 P/Hum/2018 Tentang Calon Anggota Legislatif Mantan Narapidana*, Volume 1 Nomor 2.

Yusitia, 2019, *Kedudukan Mantan Narapidana Dalam Mengikuti Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/Puu-Xvii/2019*, Volume 20, Nomor 2.

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 perubahan atas Undang-undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan
Pelanggaran Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata
Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

SURAT KEPUTUSAN

Salinan Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Maluku Utara
Nomor:03/PS/Bwsl.32.00/VIII/2018.